

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Data penelitian yang sudah terkumpul disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sebenarnya di lokus penelitian. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder berupa perwal Semarang no 22 tahun 2018 dan perwal Semarang nomor 88 tahun 2018. Subjek penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program kampung tematik *home industry* Kota Semarang. Informasi yang diterima dan digali dari hasil wawancara dengan informan menjadi data primer kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	informan	Pekerjaan atau jabatan
1.	Informan 1	Sub Koordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang
2.	Informan 2	Kasi Pembangunan Kecamatan Candisari
3.	Informan 3	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Karanganyar Gunung
4.	Informan 4	Ketua RW 05
5.	Informan 5	Koordinator Kampung Tematik <i>Home industry</i>
6.	Informan 6	Ketua RW 05 saat pembentukan kampung tematik <i>home industry</i>
7.	Informan 7	Pelaku UKM/ Ketua RT 07
8.	Informan 8	Pelaku UKM/ Ketua RT 10
9.	Informan 9	Pelaku UKM

Sumber: Peneliti

3.1 Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik

Home industry

Analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* dalam penelitian ini menggunakan komponen tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan untuk menganalisis pemberdayaan tersebut. Program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan peraturan walikota Semarang nomor 22 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan kampung tematik. Tindak lanjut dari analisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* adalah rekomendasi untuk dilakukan :

- a. Analisis pemberdayaan masyarakat sebagai dasar dalam pengembangan kampung tematik di tahun anggaran berikutnya
- b. Analisis pemberdayaan masyarakat sebagai dasar para para pemangku kepentingan dari pemerintahan
- c. Analisis pemberdayaan masyarakat sebagai dasar masyarakat di kampung tematik *home industry* untuk melaksanakan dan pengembangan kampung tematik *home industry* untuk mendukung potensi wilayah dan mengatasi masalah wilayah

3.1.1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahap awal pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan, bahwa mereka memiliki hak dan kemampuan sehingga perlu diberdayakan dan dibangun. Hal tersebut harus dimulai dari diri mereka sendiri.

Tahap penyadaran pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* pada penelitian ini dilihat dari penyadaran potensi dan permasalahan di wilayah dan sosialisasi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*.

A. Penyadaran Potensi Dan Permasalahan Di Lingkungan Wilayah

Upaya penyadaran melalui program kampung tematik yaitu adanya pemetaan potensi dan masalah di lingkungan RW 5. Pemetaan potensi dan masalah ini nantinya dikomunikasikan secara *bottom up* kepada perangkat daerah yang pada akhirnya terbentuk identitas kampung yang memiliki *icon* sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berikut hasil wawancara dengan Bappeda Kota Semarang, bahwa :

“Kampung tematik itu kan diinisiasi oleh bapak walikota di tahun 2016, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran maka Pemkot Semarang melakukan peningkatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sarana prasarana melalui kampung tematik di Kota Semarang. Ada 3 maksud kampung tematik, terbentuknya kepribadian masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sarpras permukiman. Nah definisi kampung tematik adalah sebuah daerah dibawah administrasi kelurahan yang memiliki jati diri atau makna yang disepakati oleh masyarakat yang dijadikan tema dari kampung tematik itu sendiri.” (wawancara dengan Bappeda Kota Semarang pada tanggal 13 Desember 2021)

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa adanya program kampung tematik merupakan salah satu upaya Pemkot Semarang dalam rangka meningkatkan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana permukiman. Apa yang disampaikan oleh Bappeda Kota Semarang sesuai dengan peraturan walikota nomor 22 tahun 2018 tentang kampung tematik *home industry*. Kampung tematik berupaya memberikan pengaruh positif serta pertumbuhan pola pikir dan perilaku warga serta keberdayaan masyarakat Kota

Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kecamatan terkait latar belakang kampung tematik *home industry* didapatkan bahwa :

“Adanya kampung tematik yaitu perekonomian masyarakat di lingkungan itu bisa meningkat yaitu pendapatannya” (wawancara dengan Kecamatan Candisari pada tanggal 21 Januari 2022)

Masyarakat mengemukakan bahwa adanya kampung tematik akan melatarbelakangi perkembangan potensi masyarakat RW 5 Kelurahan Karanganyar Gunung seperti adanya peningkatan pendapatan melalui perputaran ekonomi, pengangkatan potensi lokal atau branding wilayah, serta adanya perbaikan sarana dan prasarana. Berikut hasil wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Kampung tematik *home industry* bertujuan untuk mengatasi permukiman kumuh, memperbaiki jalan dan lain sebagainya. Kampung tematik mengentaskan kemiskinan bagi umkm. Sehingga warga sekitar kalau punya hajat atau apa diusahakan belinya ke umkm. Sehingga dari umkm juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar” (wawancara dengan ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Senada dengan apa yang dikatakan oleh koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Kampung tematik *home industry* dilatarbelakangi dengan adanya potensi di Rw 5 yaitu pelaku ukm seperti kriya, rajut, snack. Adanya kampung tematik ini memperbaiki lingkungan seperti jalan, ada pavingisasi, dan mengangkat potensi lokal agar lebih terkenal” (wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry* pada tanggal 13 Juni 2021)

B. Sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Kerja Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik

Program kampung tematik inisiasi pemerintah Kota Semarang diatur dalam peraturan walikota (perwal) Semarang nomor 22 tahun 2018. Perwal tersebut untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang. Perwal nomor 22 tahun 2018 juga merupakan payung hukum bagi kampung tematik yang terbentuk sebelum berlakunya peraturan ini serta kampung tematik tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perwal nomor 22 tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bappeda Kota Semarang, bahwa :

“Pembentukan kampung tematik tahun 2016 belum terdapat petunjuk teknis hanya kisi-kisi pelaksanaan konsep dari Bappeda yaitu buku petunjuk pembentukan kampung tematik tahun 2017 yang ditandatangani oleh kepala Bappeda Kota Semarang. Kampung tematik *home industry* itu angkatan 2016, kampung tematik yang terbentuk sebelum disahkan perwal no 22 tahun 2018 tetap berlaku selama tidak bertentangan. Perwal ini sebagai payung hukum, memberikan arah dan landasan.” (wawancara dengan Bappeda Kota Semarang pada tanggal 13 Desember 2021)

Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan hal tersebut dipertegas oleh Bappeda Kota Semarang sebagai badan atau instansi kota Semarang yang menangani program kampung tematik. Perwal tersebut sebagai acuan dalam pentahapan kampung tematik yang diawali dengan penentuan tema dan pengajuan proposal untuk diverifikasi oleh Bappeda Kota Semarang. Pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik berpedoman terhadap proposal yang telah terverifikasi oleh Bappeda Kota Semarang dan perangkat daerah yang terkait dengan tema yang diusulkan. Hal tersebut ditambahkan oleh pihak Kecamatan Candisari, bahwa :

“Pelaksanaan kampung tematik pedomannya ya hanya proposal yang diajukan kepada bappeda itu. Petunjuk teknis yang kita tau ya proposal itu” (wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Kelurahan Karanganyar Gunung, bahwa :

“Pedoman pelaksanaan kampung tematik proposal pengajuan yang diverifikasi oleh Bappeda. Kampung tematik hanya mengajukan proposal saja. Misalnya tahun ini ada pengajuan proposal kampung tematik lele terus diajukan ke pemerintah kota, dipaparkan. Kalau oke dibangun. Gitu aja. Cuma proposal. Ya cuma suruh mengajukan kampung tematik di rw itu yang mau diajukan apa.” (wawancara dengan kelurahan pada tanggal 26 Januari 2022)

Hasil wawancara yang peneliti lakukan menemukan fenomena pada sosialisasi mekanisme dan prosedur kerja pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* bahwa pihak kecamatan, dan kelurahan tidak mengerti terkait adanya perwal tersebut. Pihak kelurahan dan kecamatan mengkonfirmasi bahwa dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik termasuk kampung tematik *home industry* hanya berpedoman pada proposal yang diajukan pada tahun 2016 sementara berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa isi dari kisi-kisi pelaksanaan pada buku petunjuk pembentukan kampung tematik tahun 2017 dan perwal no 22 tahun 2018 tidak jauh berbeda. Hal tersebut dipertegas kembali pada perwal tersebut bahwa pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik baik yang terbentuk saat perwal ditetapkan atau sebelum perwal ditetapkan yaitu memiliki prosedur kerja yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RW 5 serta koordinator kampung tematik diketahui bahwa tidak mempunyai salinan proposal tersebut atau perwal nomor 22 tahun 2018 sehingga menjadikan pemangku kepentingan di wilayah RW

5 terkait kampung tematik *home industry* kebingungan terhadap arah pelaksanaan kampung tematik. Ketua RW 5 menjelaskan sebagai berikut :

“Tidak ada mbak saya proposal kampung tematik *home industry*. Mungkin di ketua RW 5 yang lama” (wawancara dengan Ketua RW 5 pada tanggal 24 Desember 2021)

Hal tersebut dikonfirmasi oleh koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Kalau perwal yang mbak tunjukkan ini saya baru baca pertama kali ini. Proposal kampung tematik *home industry* saya ndak tau mbak. Saya juga ndak punya. Setahu saya proposal itu yang menyusun kelurahan. Masyarakat tidak dilibatkan. Saya ndak tau mbak kampung tematik itu tujuannya apa secara pasti.” (wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Penggalan data lebih lanjut yang peneliti lakukan diketahui bahwa pemangku kepentingan di masyarakat seperti ketua RW serta koordinator kampung tematik tidak mengetahui isi dari proposal dan tidak mempunyai berkas proposal yang diajukan dalam pembentukan kampung tematik. Koordinator kampung tematik *home industry* juga menyatakan bahwa kebingungan dalam keberjalanan kampung tematik *home industry* untuk dibawa kemana karena tidak mempunyai pegangan atau pedoman. Sementara perwal nomor 22 tahun 2018 disebutkan apa saja tujuan dari pelaksanaan kampung tematik, keluaran dari pelaksanaan, hasil dari pelaksanaan, tahapan pembentukan kampung tematik, serta bagaimana pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses menggunakan fasilitasi anggaran lain yang ada di Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang memiliki anggaran sebanyak dua ratus juta yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 200.000.000. Anggaran dua ratus juta tersebut

dianggarkan satu kali sesuai dengan proposal yang diajukan dan diverifikasi oleh Bappeda Kota Semarang. Anggaran pelaksanaan kampung tematik juga bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau swadaya masyarakat. Bappeda Kota Semarang mengemukakan, bahwa :

“Kampung tematik memang mendapatkan anggaran 200 juta bersumber dari APBD. 200 juta itu memfasilitasi kegiatan fisik dan non fisik, tapi tidak termasuk modal. Bantuan modal usaha itu tidak ada” (wawancara dengan Bappeda pada tanggal 14 Juni 2021)

Hal senada disampaikan oleh pihak Kecamatan, bahwa :

“Anggaran 200 juta, digunakan untuk perbaikan lingkungan, infrastruktur, membuat gapura, tentunya dalam rangka agar meningkatkan pendapatan masyarakat karena lingkungannya sudah terkenal.” (wawancara dengan Kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Pihak kelurahan turut mengonfirmasi pernyataan Bappeda Kota Semarang dan Kecamatan Candisari, bahwa :

“Pengelontoran anggaran 200 juta itu lewat rekanan (CV atau PT yang telah diijinkan pemerintah kota untuk membangun di wilayah bertanggung jawab untuk pembangunan) dia ada konsultannya ada pengawasnya. Pemborong itu juga harus sama dengan DPA (daftar pengajuan anggaran) sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara dengan Kelurahan pada tanggal 19 Januari 2022)

Hasil wawancara dengan Bappeda, kecamatan, dan kelurahan sepakat bahwa anggaran 200 juta tersebut dianggarkan dalam bentuk fisik dan non fisik. Bappeda mempertegas bahwa tidak ada bantuan modal dalam pelaksanaan kampung tematik. Bappeda Kota Semarang menambahkan bahwa pelaksanaan kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah. Anggaran tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan kampung tematik misalnya perawatan atau pelatihan untuk mendukung potensi wilayah. Pengusulan

anggaran ini dapat melalui musrenbang. Berikut hasil wawancara dengan Bappeda Kota Semarang, bahwa :

“Kaitannya dengan kampung tematik ketika dia sudah mendapatkan anggaran 200 juta itu bukan berarti pendanaan dan pelaksanaan disitu distop, kan kita pasti tau kalau anggaran itu terbatas dan tidak bisa meningkatkan semua potensi dan mengatasi semua masalah. Ketika dia sudah mendapatkan anggaran dari APBD 200 juta dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan potensi dan mengatasi masalah itu dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah termasuk di kecamatan dan kelurahan. Kan itu ada PKK, LPMK, musrenbang, CSR, swadaya masyarakat dan sebagainya” (wawancara dengan Bappeda pada tanggal 14 Juni 2021)

Hal senada disampaikan oleh koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Anggaran 200 juta mbak, saya juga baru tau beberapa waktu lalu saat bappeda monitoring itu kalau selanjutnya anggaran lewat musrenbang tapi dalam usulan tidak langsung mengucur sendiri. Pakai prosedur.” (wawancara dengan Koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Analisis Penyadaran :

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis pada tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik, masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan terhadap pelaksanaan kampung tematik. Masyarakat memiliki cara pandang bahwa adanya kampung tematik merupakan sarana untuk mengetahui potensi yang ada di wilayah RW 5 yaitu banyaknya pelaku ukm serta masalah yang dapat diatasi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*. Masyarakat mengemukakan bahwa adanya kampung tematik akan melatarbelakangi perkembangan potensi masyarakat RW 5 Kelurahan Karanganyar

Gunung seperti adanya peningkatan pendapatan melalui perputaran ekonomi, pengangkatan potensi lokal atau branding wilayah, serta adanya perbaikan sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan yaitu pihak pemerintahan dan masyarakat diketahui bahwa mereka sepakat untuk berdaya melalui program kampung tematik *home industry*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dan prioritas telah sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari program pemberdayaan telah tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat menyadari bahwa memiliki potensi untuk dapat diberdayakan melalui program kampung tematik *home industry*.

Pada aspek sosialisasi mekanisme dan prosedur kerja pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* diketahui bahwa pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat belum mengerti terkait perwal nomor 22 tahun 2018 sebagai prosedur kerja. Bappeda telah menegaskan bahwa keberadaan perwal nomor 22 tahun 2018 merupakan payung hukum yang memberikan arah bagi kampung tematik. Ketidaktahuan pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat akan berpengaruh terhadap keberjalanan program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Gagasan-gagasan dalam rangka pemecahan masalah serta pengangkatan potensi wilayah tidak akan terakomodasi dengan baik karena penyampaian secara *bottom up* tidak akan tercapai secara optimal. Pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat tidak mengerti arah, maksud, dan tujuan dari program tersebut secara rinci.

Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* memiliki anggaran sebesar Rp 200.000.000 yang diberikan dalam bentuk fisik dan nonfisik. Berdasarkan wawancara Bappeda mengakui bahwa anggaran dua ratus

juta tersebut terbatas dan tidak bisa meningkatkan semua potensi serta mengatasi semua masalah sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik dapat bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau swadaya masyarakat. Hal tersebut sama seperti yang tertuang dalam pasal 25 perwal nomor 22 tahun 2018, lebih lanjut pada pasal 26 diketahui bahwa pelaksanaan kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah seperti pemberdayaan perempuan, forum kesehatan kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan, fasilitasi penanggulangan kemiskinan, serta lain lain yang dapat mendukung pelaksanaan kampung tematik *home industry*.

Hal tersebut juga tertuang di perwal semarang nomor 88 tahun 2018 bahwa usulan kegiatan sarana dan prasarana melalui fasilitasi musrenbang kelurahan, usulan yang menggunakan dana dari alokasi dasar (DAU) tambahan dan usulan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan kampung tematik menjadi prioritas utama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti usulan yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan kampung tematik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah menjadi salah satu faktor prioritas usulan. Sehingga diketahui bahwa anggaran dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik bersumber dari APBD 200 juta serta disinergikan dengan fasilitas anggaran lain yang ada di perangkat daerah, CSR, dan swadaya masyarakat untuk mendukung potensi dan memecahkan masalah yang ada.

Pada tahap penyadaran perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang masif terkait arah dan mekanisme program sehingga program dapat berjalan secara

optimal. (Handityasa & Purnaweni, 2020) menyebutkan bahwa sosialisasi dilakukan dalam rangka pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan daripada program serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam prosedur sehingga dapat melaksanakan program sebaik-baiknya. Masyarakat perlu memahami bagaimana mekanisme dan prosedur kerja pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* karena program ini harus melibatkan masyarakat secara proaktif sehingga masyarakat dapat memahami kondisi lingkungan untuk menyesuaikan keberjalanan pemberdayaan dapat berjalan secara baik melalui program kampung tematik *home industry*.

3.1.2. Tahap Pengakapasilan

Tahap pengkapasilan merupakan kegiatan untuk diberdayakan kecakapan dalam mengelola serta menggali kemampuan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* untuk lebih terampil dan mampu mengambil peluang. Kegiatan atau upaya tersebut dilihat dari pelaksanaan kampung tematik *home industry* yang terdiri dari pembentukan kampung tematik *home industry* dan penurunan anggaran.

A. Pembentukan Kampung Tematik *Home Industry*

Pembentukan kampung tematik *home industry* terdiri dari beberapa tahapan berawal dari adanya penggalian potensi dan permasalahan oleh masyarakat, kelurahan, dan kecamatan dengan membentuk tim penentuan tema dan tim penentuan kampung tematik. Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bappeda terkait pembentukan kampung tematik, bahwa :

“*Home industry* di karanganyar gunung itu kan salah satu kampung tematik di angkatan 2016 dengan potensi adanya ukm yang bermacam-macam dan

tidak spesifik antara lain rajut, aneka snack, kriya dan sebagainya. Mereka itu dari proses perencanaan dari bikin pamaparan, keluaran dan verifikasi itu akhirnya disetujui dan mendapatkan anggaran 200 juta” (Wawancara dengan Bappeda pada tanggal 14 Juni 2021)

Kecamatan memberikan keterangan bahwa :

“Pengajuan kampung tematik *home industry* itu penyusunan proposal dari kelurahan dan masyarakat. Kecamatan mendampingi memasukkan anggaran DPA. Setelah itu masyarakat melakukan pemaparan di Bappeda. Kecamatan penyambung antara Bappeda dan Kelurahan. Pelaksanaan kampung tematik pedomannya ya hanya proposal yang diajukan kepada Bappeda. Kan masyarakat mengajukan proposal itu, kampungnya untuk apa, kriteria seperti apa, terus disitu kegiatannya apa. Jadi harapannya bisa untuk menambah pendapatan di lingkungan warga sekitar itu” (Wawancara dengan Kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh pihak kelurahan, bahwa :

“Kampung tematik buat proposal, proposalnya diajukan ke pemkot melalui Bappeda. Terus ada jadwal paparan nah nanti sama tim penilai, tim penilai itu lolos nggak untuk maju sebagai kampung tematik. Kalau lolos dapat bantuan, kalau nggak lolos berarti nggak dapat bantuan. Kampung tematik *home industry* lolos sebagai angkatan pertama yaitu tahun 2016” (Wawancara dengan Kelurahan pada tanggal 26 Januari 2022)

Hasil wawancara pihak Bappeda dan Kelurahan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perwal nomor 22 tahun 2018. Perwal tersebut menjelaskan bahwa pembentukan kampung tematik *home industry* berawal dengan penyusunan draf proposal berisi latar belakang, potensi, permasalahan, kondisi eksisting wilayah, rencana tindak lanjut, desain dan rencana anggaran belanja (RAB). Pemaparan dan presentasi proposal kepada Bappeda Kota Semarang dan OPD pendamping sebagai tim verifikasi setelah itu supervisor lapangan mengecek tingkat kesesuaian isi proposal dengan kenyataan di lapangan serta menyusun sinkronisasi. Pemaparan proposal dapat dilakukan kembali setelah adanya hasil revisi. Kampung tematik

yang lolos ditetapkan melalui surat keputusan (SK) walikota terkait lokasi dan tema kampung tematik.

Peneliti menggali lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam memetakan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah RW 5 saat mengajukan proposal sebagai kampung tematik *home industry*. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry*, Ketua RW mengemukakan, bahwa :

“Saya sebagai Ketua RW saat itu, saya punya target untuk mengatasi permukiman kumuh, memperbaiki jalan dan lain sebagainya. Akhirnya saya konsultasi dengan pak lurah untuk mengajukan kampung tematik. Setelah proposal jadi saya baru mengkomunikasikan ke RT di lingkungan RW 5” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Sementara itu, koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Proposal kampung tematik saya ndak tau mbak. Saya juga ndak punya. Setahu saya proposal itu yang menyusun kelurahan. Masyarakat tidak dilibatkan” (wawancara dengan Koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Masyarakat kampung tematik *home industry* sekaligus Ketua RT 07 memberikan keterangan yang mendukung pernyataan koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Kalau soal kampung tematik ini tidak semua tau mbak. Karena dulu itu, kalau sekarang setiap musren itu harus ada perempuan. Rembug perempuan. Perempuan harus ada 30%. Kalau dulu kan nggak. Jadi kalau tanya sama ibu ibu. Bapak2 pun jarang yang paham. Harusnya musyawarah dulu rt ke rw” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 07 pada tanggal 24 Desember 2021)

Keterangan yang sama diberikan oleh masyarakat kampung tematik *home industry* sekaligus Ketua RT 10, bahwa :

“Tidak ada mbak rapatnya dulu saat mau dibentuk kampung tematik. Saya taunya waktu penganggaran dibangun gapura, perbaikan jalan, paving” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 10 pada tanggal 20 Januari 2022)

Hasil penelitian dengan masyarakat kampung tematik *home industry* menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat saat memetakan potensi dan permasalahan di RW 5 saat pengajuan proposal masih minim. Hal ini terlihat dari pengakuan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik yaitu setelah proposal jadi baru dikomunikasikan kepada ketua RT di RW 5. Hal senada juga dikatakan oleh koordinator kampung tematik serta ketua RT bahwa saat penyusunan proposal masyarakat tidak dilibatkan.

B. Penurunan anggaran

Penurunan anggaran kampung tematik *home industry* yaitu senilai 200 juta dianggarkan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Bappeda. Berdasarkan dokumen proposal diketahui bahwa alokasi anggaran Rp 200.000.000 digunakan untuk pembangunan jalan, saluran, gapura, tempat sampah, pot, lampu taman, tiang, instalasi, serta tanaman hias. Berikut usulan rencana pengembangan serta realisasi kampung tematik *home industry* pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Daftar Usulan Rencana Pengembangan dan Realisasi Kampung Tematik *Home Industry* 2016

USULAN RENCANA PENGEMBANGAN				REALISASI		
No.	Uraian	Jumlah	Ket		DPA	Realisasi
	Fisik					
1.	Pembuatan ruang display dan kantor	Rp 150.000.000	APBD	PPK	650.000	650.000
2.	Penerangan jalan	Rp 20.000.000	APBD	Pejabat Pengadaan	300.000	300.000
3.	Perbaikan Selokan	Rp 50.000.000	APBD	PPHP	250.000	250.000
Jumlah		Rp 220.000.000		Sosialisasi	-	-
Non Fisik				Konsultan Perencanaan	2.800.000	2.800.000
1.	Pelatihan pemasaran online	Rp 10.000.000	APBD	Konsultan Pengawasan	2.800.000	2.800.000
2.	Pelatihan pengelolaan sampah	Rp 10.000.000	APBD (Musrenbang)			
3.	Pelatihan pengepakan	Rp 10.000.000	APBD	Jalan	97.500.000	97.371.000
4.	Pelatihan manajemen bisnis	Rp 10.000.000	APBD	Saluran	60.500.000	60.361.000
5.	Pelatihan seni	Rp 20.000.000	STIEP ARI	Gapura	8.000.000	7.940.000
6.	Pendampingan dari koperasi	Rp 20.000.000	ASM	Tempat Sampah	1.500.000	1.450.000
Total		Rp 300.000.000	POT		9.500.000	9.450.000
			Lampu Taman+Tiang+Instalasi		9.500.000	9.450.000
			Tanaman Hias		6.250.000	6.250.000
			Jumlah		199.550.000	199.072.000

Sumber: Kecamatan Candisari, 2022

Berdasarkan usulan rencana pengembangan dan daftar realisasi kampung pada Tabel 3.2 diketahui realisasi kampung tematik dianggarkan dalam bentuk jalan, saluran, gapura, tempat sampah, pot, lampu taman, tiang, instalasi, dan tanaman hias. Bappeda memberikan keterangan, bahwa :

“Penggangan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah di verifikasi dan disetujui. Jadi pada tahun anggaran berikutnya setelah proposal disetujui itu semua sudah mulai kita bangun.” (Wawancara dengan Bappeda pada tanggal 02 Februari 2022)

Pihak Kelurahan Karanganyar Gunung turut mengonfirmasi pernyataan Bappeda Kota Semarang, bahwa :

“Pengelontoran anggaran 200 juta itu lewat rekanan (CV atau PT yang telah diijinkan pemerintah kota untuk membangun di wilayah bertanggung jawab untuk pembangunan) dia ada konsultannya ada pengawasnya. Pemborong itu juga harus sama dengan DPA (daftar pengajuan anggaran) sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara dengan Kelurahan pada tanggal 19 Januari 2022)

Peneliti menggali informasi lebih dalam kepada masyarakat bagaimana penganggaran kampung tematik *home industry*. Berikut hasil wawancara dari ketua rw yang menjabat saat penganggaran kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Untuk anggaran saya tahu nya 200 juta yang dikucurkan berapa saat itu saya nggak urusan. Yang penting wilayah saya ada perubahan. Saya kurang tau nilainya saat itu. Saya taunya cuma pengajuannya buat jalan, administrasi dan lain-lain” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* menuturkan, bahwa :

“Pertama kali ada tematik 200 juta itu katanya dapat gapura, pavingisasi, mural, pot pot, penutup got itu. Pot pot malah nggak sampai wilayah bawah Cuma di atas aja. Cuma sampe rt 7. Gapura dan pot-pot besar itu yang mengerjakan rekanan. Saya tanya sama yang ngirim “lhoh mas kok ditaruh disini?” dijawab "perintahnya begitu”” (Wawancara dengan Koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Hal senada disampaikan oleh pelaku ukm, bahwa :

“Pembangunan jalan, paving sama grill selokan” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 10 pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm yang lain turut serta menambahkan, bahwa :

“Setau saya ada pembangunan gapura. Tapi gapurnya saja di dalam og di RT 07. Tidak di depan yang masyarakat luar bisa mencari dengan mudah oh ini kampung tematik home insutri.” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 07 pada tanggal 24 Desember 2021)

Pelaku ukm di kampung tematik *home industry* mengemukakan ketidaktahuannya, bahwa :

“Kalau soal anggaran dan distribusinya saya kurang tau” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 16 Februari 2022)

Hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry* serta masyarakat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang mengetahui terkait anggaran senilai Rp 200.000.000 dan dialokasikan pada pembangunan apa saja, namun terdapat masyarakat yang tidak mengetahui terkait anggaran tersebut dan dialokasikan pada pembangunan apa saja.

Analisis Pengkapasitasan :

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis pada tahap pengkapasitasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* sudah sesuai dengan kaidah pemberdayaan yaitu adanya pemetaan potensi serta permasalahan yang ada, namun partisipasi masyarakat dalam memetakan potensi serta permasalahan yang ada tersebut belum terakomodasi dengan baik. Belum terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam memetakan potensi serta permasalahan yang ada karena tidak adanya pelibatan dalam penyusunan proposal

pengajuan kampung tematik *home industry*. Dahama dan Bhatnagar dalam (Mardikanto, 2019: 246) mengemukakan bahwa masyarakat adalah sumberdaya terbesar sehingga dalam perumusan program pemberdayaan harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat sebagai penerima manfaat itu sendiri. Hal tersebut sekaligus berkaitan bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga apapun upaya pembangunan harus mampu untuk sebesar-besarnya menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang tersedia di masyarakat. Perumusan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Dalam rangka menggerakkan semua pihak untuk terlibat aktif berpartisipasi penting adanya koordinasi yang baik.

Pada aspek penurunan anggaran yaitu terdapat masyarakat yang mengetahui berapa dana kampung tematik *home industry* yang mengucur serta dilaksanakan dalam pembangunan apa saja dan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui terkait anggaran tersebut dan dialokasikan dalam pembangunan apa saja. Penurunan anggaran kampung tematik *home industry* senilai Rp 200.000.000 dialokasikan sesuai dengan daftar usulan rencana pengembangan dan realisasi (lihat Tabel 3.2). Penggelontoran anggaran Rp 200.000.000 melalui rekanan (CV atau PT yang telah diijinkan pemerintah kota untuk membangun di wilayah bertanggung jawab untuk pembangunan) yang memiliki konsultan dan pengawas sehingga pemborong tersebut sama dengan DPA (daftar pengajuan anggaran) sesuai dengan aturan yang ada.

3.1.4. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahap diberikannya peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Pada tahap ini masyarakat yang diberikan peluang sesuai kemampuan dan minat mereka merupakan upaya agar mereka berpartisipasi aktif secara sukarela tanpa paksaan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Masyarakat dituntut memiliki peningkatan kemampuan melalui *selfevolution* atas pilihan mereka sendiri sehingga lebih mandiri. Penelitian ini melihat pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* dilihat dari pengembangan kampung tematik *home industry* dan hasil dari pelaksanaan kampung tematik *home industry* yang dilihat dari segi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

A. Pengembangan Kampung Tematik *Home Industry*

Pengembangan kampung tematik *home industry* yaitu kegiatan setelah terbentuknya kampung tematik serta adanya penganggaran. Pengembangan kampung tematik *home industry* memerlukan adanya keterlibatan dari *stakeholders*. Informasi dari kecamatan, kelurahan dan masyarakat menunjukkan adanya keterlibatan dari berbagai *stakeholders* dalam pengembangan program kampung tematik *home industry*. Pengembangan kampung tematik *home industry* meliputi kegiatan mengembangkan potensi wilayah dan memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan uraian pada sub bab tahap penyadaran yaitu sosialisasi mekanisme dan prosedur kerja diketahui bahwa upaya untuk mengembangkan potensi wilayah dan memecahkan masalah yang ada yaitu dengan menggugah pengusaha dalam memberikan tanggung jawab sosialnya (CSR) dan mengajukan kebutuhan melalui musrenbang.

Kampung tematik *home industry* mendapatkan pendampingan dari AIESEC sebagai CSR. Pendampingan ini diberikan kepada pelaku ukm bidang kuliner. Terdapat 6 pelaku ukm yang diberikan pendampingan, adanya kuota ini karena terbatasnya sumberdaya AEISEC. Hal ini dijelaskan oleh koordinator kampung tematik *home industry* dan pelaku ukm yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari Aiesec. Koordinator kampung tematik mengemukakan, bahwa :

“Aiesec itu ada 6 ukm yang ikut pendampingan digitalnya. Awalnya ada kuota 10 tapi dikurangi jadi 8 dikurangi lagi jadi 6. Kuota tersebut yang menentukan Aiesec karena disesuaikan sama sumber daya mereka. Aiesec hanya membantu pemasaran dan media sosialnya. Kalau CSR untuk pembangunan seperti pemeliharaan sarana prasarana, pembangunan fisik, mural itu belum ada” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 16 Februari 2022)

Hal senada disampaikan oleh pelaku ukm sekaligus ketua RT 10, bahwa :

“Saya produksi aneka snack mbak, termasuk dalam ukm yang mendapat pendampingan dari Aiesec.” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 10 pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm lainnya turut serta mengiyakan bahwa mendapatkan pelatihan dari Aiesec. Pelaku ukm sambal abal jabon mengatakan, bahwa :

“Iya saya (pelaku ukm sambal abal jabon) dapat pendampingan dari Aiesec mbak” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 16 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara menyebutkan bahwa masyarakat khususnya pelaku ukm di kampung tematik *home industry* mendapatkan pendampingan dari AIESEC sebagai CSR. Terdapat enam pelaku ukm yang diberikan pedampingan yaitu bidang kuliner. Adanya kuota ini karena terbatasnya sumber daya AEISEC. Koordinator kampung tematik saat wawancara mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat sepuluh kuota dari AIESEC, kemudian turun menjadi delapan, dan turun lagi

menjadi enam. Koordinator kampung tematik juga menambahkan bahwa AIESEC hanya membantu pemasaran dan media sosial sementara untuk pemeliharaan sarana prasarana, pembangunan fisik di kampung tematik *home industry* belum ada pengusaha yang tergugah tanggung jawab sosialnya.

Bappeda menjelaskan terkait pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik yaitu dapat melalui usulan musrenbang. Perwal Kota Semarang nomor 88 tahun 2018 menyebutkan bahwa usulan kegiatan sarana dan prasarana melalui fasilitasi musrenbang kelurahan, usulan yang menggunakan dana dari alokasi dasar (DAU) tambahan dan usulan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan kampung tematik menjadi prioritas utama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti usulan yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan kampung tematik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah menjadi salah satu faktor prioritas usulan. Berikut merupakan hasil wawancara bagaimana masyarakat di kampung tematik *home industry* berdaya mengembangkan potensi wilayahnya melalui musrenbang. Koordinator kampung tematik *home industry* mengatakan, bahwa :

“Kampung tematik itu anggarannya setelah 200 juta masuk di musrenbang dalam bentuk usulan tidak langsung mengucur sendiri. Pakai prosedur. Kampung tematik *home industry* dalam pengembangan kampung tematik sudah mengajukan galeri (rumah kios pelaku ukm). Galeri sedang tahap pembangunan karena saat pandemi ada refocusing anggaran” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm sekaligus Ketua RT 10 menuturkan hal senada dengan koordinator, bahwa :

“Ada pembangunan seperti pembangunan galeri. Itu juga belum selesai sekitar 70 atau 80 persen lagi.” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 10 pada tanggal 20 Januari 2022)

Pihak kelurahan mengonfirmasi, bahwa :

“Pembangunan galeri itu baru sekian persen, nanti mau dilanjutkan tahun ini. Menunggu petunjuk. Insyaallah tahun ini diselesaikan” (Wawancara dengan kelurahan pada tanggal 19 Januari 2022)

Pihak Bappeda turut memberikan keterangan, bahwa :

“Ini kan pembangunan galeri dari musrenbang, musrenbang itu kan bentuk aspirasi masyarakat. Khidmat saya ini dianggarkan kalau nggak 2020 ya 2021. Nah refocusing itu dilaksanakan di seluruh Indonesia karena pandemi. Sehingga APBD yang sudah terstruktur, dan pandemi datang itu sebagian anggaran di refocusing untuk menanggulangi covid. Nah salah satunya itu pembangunan galeri. Sehingga dianggarkan di tahun 2022”. (Wawancara dengan Bappeda pada tanggal 02 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di kampung tematik *home industry* diketahui bahwa selama ini masyarakat telah mengusulkan adanya pembangunan galeri sebagai tempat *display* dan pemasaran produk pelaku ukm kampung tematik *home industry*. Masyarakat juga mengetahui terkait pentahapan dan proses pembangunan galeri. Pembangunan galeri masih belum selesai karena terhalang adanya refocusing anggaran pandemi covid-19. Hasil wawancara dengan Bappeda dan Kelurahan menyebutkan bahwa refocusing tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia akibat pandemi sehingga APBD yang sudah terstruktur kemudian pandemi datang maka anggaran tersebut di refocusing untuk menanggulangi covid-19.

Peneliti melakukan observasi di lapangan bersama dengan koordinator kampung tematik *home industry* mengunjungi bangunan galeri tersebut. Penampakan bangunan galeri kampung tematik *home industry* dapat dilihat pada gambar 3.1. Koordinator kampung tematik menjelaskan, bahwa :

“Galeri belum selesai mbak, belum ada plamirnya belum ada terasnya. Cuma bangunan saja” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 24 Desember 2021)

Gambar 3.1
Galeri Kampung Tematik *Home industry*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwa bangunan galeri masih hanya berbentuk bangunan yang belum ada teras dan plamirnya (lihat Gambar 3.1). Koordinator kampung tematik *home industry* menambahkan bahwa nantinya galeri tersebut akan digunakan sebagai tempat pemasaran atau display produk pelaku ukm di kampung tematik *home industry*. Hal ini juga sebagai upaya untuk menarik para konsumen dan meningkatkan eksistensi kampung tematik *home industry*. Koordinator kampung tematik *home industry* menuturkan, bahwa :

“Rencana saya nanti kalau galeri sudah selesai akan dijadikan tempat display produk pelaku ukm disini. Jadi para calon pembeli tidak perlu datang ke rumah masing-masing pelaku ukm karena semuanya sudah dipajang disini. Misal nanti ada kunjungan dari pemerintah atau dari mana

seperti itu, mereka bisa langsung ke galeri melihat produk-produk kami” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 24 Desember 2021)

Peneliti melakukan observasi terkait sarana prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Semarang melalui anggaran kampung tematik senilai 200 juta. Selama keberjalanan kampung tematik *home industry* banyak sarana prasarana yang sudah rusak dan mural yang mulai memudar dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Mural di Kampung Tematik *Home industry* yang mulai memudar



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berikut hasil wawancara koordinator kampung tematik *home industry* dan masyarakat. Koordinator kampung tematik *home industry* menerangkan, bahwa :

“Gapura itu catnya sudah pudar mbak, udah pada cuil juga. Materialnya. Kita dari masyarakat juga nggak bisa membenahi karena nggak ada dana. Harusnya kalau membenahi itu harus bareng-bareng. Cuma ini kan mbak tematik ini kan cuma terkenal dari rt 10 aja. Padahal kan satu rw. Punya rt 1-12. Nggak Cuma rt 10. Rt 10 itu cuma ada aneka snack, tahu bakso dan rajut bu as sama saya. Jadi kekompakannya kurang” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* turut serta memberikan keterangan yang senada dengan koordinator, bahwa :

“Untuk destinasi sendiri di kampung tematik *home industry* itu memang belum menarik ya, karena muralnya juga sudah memudar” (Wawancara

dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm kampung tematik menuturkan, bahwa :

“Pembangunan kampung tematik ada jalan, paving, sama grill selokan sekarang sudah neyeng, itu dari tematik dulu. Jadi perawatannya kurang” (Wawancara dengan pelaku ukm sekaligus ketua RT 10 pada tanggal 20 Januari 2022)

Pada kesempatan lain, koordinator kampung tematik memberikan keterangan tambahan, bahwa :

“Taman ramah anak dulu ada pagarnya tapi sekarang sudah hilang, terus ada muralnya buat main anak-anak. Sekarang ya seperti itu tamannya biasanya buat parkir” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut serta observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui anggaran kampung tematik Rp 200.000.000. diketahui bahwa terjadi penurunan kualitas pada bangunan tersebut. Selama perjalanannya diketahui bahwa terdapat penurunan kualitas pada bangunan-bangunan tersebut seperti cat gapura memudar, material gapura cuil, mural memudar, grill selokan yang sudah berkarat, serta taman ramah anak yang tidak difungsikan sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggali lebih jauh penyebab pengembangan kampung tematik *home industry* khususnya perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana. Pengembangan kampung tematik *home industry* mengalami kendala karena kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat yang kurang, serta kelembagaan yang belum berjalan sehingga mengakibatkan pengembangan kampung tematik *home industry* belum

optimal. Berikut hasil wawancara yang diungkapkan para informan. Koordinator kampung tematik *home industry* menuturkan, bahwa :

“Kurang aktifnya pengurus setempat mengakibatkan usulan proposal kebutuhan kampung tematik di musrenbang kurang optimal” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

“CSR dari AIESEC kan hanya pendampingan di bidang kuliner. Sementara untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana atau pembangunan fisik kita masih belum ada selain dari usulan musrenbang” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 16 Februari 2022)

Pelaku ukm memberikan keterangan, bahwa :

“Memang sekarang itu sangat menurun ya semangat pelaku ukmnya dalam rangka pengembangan kampung tematik, karena tidak ada dorongan dari ketua rw atau pengurus.” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Pihak kecamatan memberikan tanggapan, bahwa :

“Kalau bisa itu dimasukan dalam musren. Misalnya ingin dibentuk gapura baru atau perawatan gapura. Jadi mereka rebug warga dan masuk musren. Apalagi kampung tematik diprioritaskan di musren tapi tetap usulan yang dilaksanakan itu adalah yang urgent” (Wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara dari berbagai pihak seperti koordinator kampung tematik, masyarakat, serta kecamatan sepakat bahwa kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan di wilayah RW 5 yaitu Ketua RW 5 kurang dapat mengakomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang serta kurang mengayomi masyarakat untuk berdaya melalui program kampung tematik *home industry* sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang optimal.

Peneliti menggali lebih lanjut terkait pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Selain fenomena dimana masyarakat masih belum bisa bersatu dan solid untuk merawat dan memelihara sarana prasarana yang telah

dibangun, ternyata masyarakat mengalami kendala dalam membangun wilayah. Berikut hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry* dan pelaku ukm.

“Kalau untuk berdaya kita kayaknya masih ketinggalan banyak. Sepengetahuan saya tematik itu harusnya maju, ini kami masih belum. Kami punya kampung tematik seharusnya bisa menghadirkan tamu, bisa mengundang tamu (untuk berwisata), lha bagaimana caranya paguyuban saja belum berjalan. Jadi kampung tematik ini mau dibawa kemana masih bingung. Harusnya kan ada pembahasan seperti kita harus bagaimana, mau dibuat bagaimana. Jadi rembug bareng itu belum ada” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu koordinator kampung tematik *home industry* serta pelaku ukm diketahui bahwa masyarakat mengalami kendala dalam membangun wilayah. Koordinator kampung tematik *home industry* mengaku dalam hal berdaya dan branding kampung tematik *home industry* masih mengalami kesulitan. Fenomena paguyuban yang belum berjalan serta tidak ada rembug atau pembahasan terkait pengembangan dan pembangunan kampung tematik *home industry* menyebabkan pembangunan wilayah terhambat. Hal tersebut disetujui oleh kecamatan dan masyarakat karena akses jalan tidak memungkinkan dan kampung tematik *home industry* belum menarik untuk dijadikan destinasi wisata. Pihak kecamatan menuturkan, bahwa :

“Banyak kampung tematik bertebaran tapi eksistensinya kurang. Terus destinasi wisatanya akses masuknya bisa. Kalau akses jalan tidak memungkinkan, nah itu kendalanya di situ. Kalau di kecamatan candisari ini kayaknya tidak bisa. Karena jalannya sempit.” (Wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Pelaku ukm memberikan keterangan, bahwa :

“Untuk destinasi sendiri di kampung tematik *home industry* itu memang belum menarik ya, karena muralnya juga sudah memudar” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Pihak kecamatan mengkonfirmasi bahwa di Kota Semarang banyak kampung tematik bertebaran tapi eksistensinya kurang hal tersebut dipengaruhi karena akses jalan ke kampung tematik masih belum memadai termasuk kampung tematik yang ada di Kecamatan Candisari. Pelaku ukm kampung tematik *home industry* dalam wawancara menyebutkan bahwa untuk destinasi wisata di kampung tematik *home industry* masih belum menarik karena banyak mural yang sudah memudar.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang lebih mendalam, masyarakat mengaku dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* memiliki kendala dalam hal pemasaran produk, bantuan modal, serta pelatihan dan pendampingan yang masif dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat, bahwa :

“Saya tidak tahu bahwa kampung tematik memiliki fasilitas pelatihan yang dapat disinkronisasikan dengan perangkat lain yang ada di kelurahan. Pelatihan di kelurahan itu dibagi ke 6 rw. Jadi hanya perwakilan. Materi pelatihan itu sesuai dengan pelaku ukm. Hanya saja untuk prakteknya yang susah. Karena kalau pelatihan setelah keluar ruangan ya lupa. Kami lebih butuh pendampingan jadi ada pemantauan gimana hasilnya dan dievaluasi” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 24 Desember 2021)

Pelaku ukm menerangkan, bahwa :

“Pemasaran mbak masih jadi kendala, misal gini adanya bazar dari kelurahan dan kecamatan itu percuma. Karena bazar yang diadakan itu untuk ukm menengah keatas. Sementara pelaku ukm di kampung tematik *home industry* target pasarnya masih menengah kebawah. Sehingga kesulitan pemasaran” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm yang lain memberikan keterangan terkait kendala yang dialami. Pelaku ukm tersebut memberikan keterangan, bahwa :

“Kendala di anggaran mbak, seperti bantuan modal. Kalau ukm yang sudah lancar ya udah lancar. Kalau yang belum seperti saya ini modal jadi kendala”. (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik mengemukakan bahwa pada tahun 2017 pernah terdapat bantuan modal dari BNI atas nama kampung tematik dan terdapat dua pelaku ukm yang diberikan bantuan modal. Berikut hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik, bahwa :

“Dulu pernah ada bantuan modal dari BNI pada tahun 2017 atas nama kampung tematik khusus bagi pelaku ukm yang belum memiliki pengajuan pinjaman di bank lain. Ada dua pelaku ukm yang mendapatkan bantuan yaitu pelaku ukm sambal abal jabon dan prol tape. Setelah itu tidak ada penawaran bantuan modal lagi mbak.” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 16 Februari 2022)

Bappeda telah menjelaskan bahwa berdasarkan Perwal No. 22 tahun 2018 diketahui bahwa pelaksanaan kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah sehingga kendala atau masalah yang ada di wilayah dapat dipecahkan secara bersama sama dengan bersinergi dengan program lain yang ada di perangkat daerah. Berikut hasil wawancara dengan Bappeda.

“Semua kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya ini tidak bisa berhenti hanya sebagai wacana ditingkat masyarakat. Harus terkomunikasi minimal sampai ke kelurahan. Apa apa yang dibutuhkan masyarakat selama dalam proses komunikasi itu semua bisa dicocokkan kegiatan yang ada untuk mendukung. Sehingga cara pandangya bukan tentang masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan namun bagaimana tindak lanjut supaya masyarakat dapat terfasilitasi kebutuhannya” (Wawancara dengan Bappeda pada tanggal 02 Februari 2022)

B. Tercapainya Hasil Dan Keluaran Dari Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Kampung Tematik Home Industry

1. Terbentuknya Kepribadian Dan Perilaku Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan (Sosial)

Berdasarkan penjelasan dari sub konteks diketahui bahwa tujuan adanya program kampung tematik adalah inisiasi Pemkot Semarang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang dengan peningkatan potensi lokal, pemberdayaan, peningkatan sarana prasarana dan pelaksanaan kampung tematik. Pelaksanaan kampung tematik yang diawali dengan pembentukan kampung tematik, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik merupakan cara untuk membentuk kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kaitannya dengan kampung tematik *home industry*, peneliti telah mengumpulkan data terkait terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Berikut hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry* menerangkan, bahwa :

“Kampung tematik disini itu ada tetap berjalan aktivitas ukmnya ada kepengurusan dan paguyubannya yang nggak berjalan. Ketua RW nya aja masih bingung og mbak, ketua rw nya tidak paham atau tidak mau memahami karena diajak pertemuan untuk lobby, minta izin, mau ketemuan kapan, mau merembug soal tematik itu ditunda tunda terus”. (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Pelaku ukm memberikan keterangan yang sama, bahwa :

“Waktu lomba ekonomi kreatif kampung tematik (tahun 2018) kita juara 2, saat itu masyarakat sudah bergotong royong sudah semangat. Ketua rw nya cuma jawabnya “*wes seadanya aja. Nggak usah susah susah. Nggak usah ngoyo-ngoyo*”. Malah mendoakan kalah mbak katanya biar nggak menang dan maju lagi. Karena kalau maju lagi butuh biaya lagi katanya. Kita masyarakat sudah semangat, udah kerja bakti, udah mengeluarkan tenaga. Kok kayak gitu respon Ketua RW nya.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm yang lain memberikan pendapatnya, bahwa :

“Memang sekarang itu sangat menurun ya semangat pelaku ukmnya dalam rangka pengembangan kampung tematik, karena tidak ada dorongan dari ketua rw atau pengurus. Komunikasi kurang. Cuma koordinator yang bergerak. Termasuk kemarin ada pertemuan, justru disini monitor penggeraknya cuma koordinator. Ketua RW nya nggak jalan sama sekali” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* sekaligus pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

“Paguyuban kurang bersatu. Harusnya memang perlu ditingkatkan dan disemangati sama pemimpin wilayah. Kita biasanya kalau diadakan pertemuan itu nggak semuanya datang. Kan mau dibahas bareng ya gimana ya to mbak?” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 24 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa terlihat adanya semangat masyarakat untuk terus berdaya dan membangun potensi di wilayah kampung tematik *home industry*. Hal tersebut terlihat dari semangat masyarakat melalui lomba ekonomi kreatif tahun 2018 yang mendapatkan juara 2. Namun dalam pelaksanaannya diketahui bahwa semangat masyarakat tidak diimbangi dengan kapabilitas pemangku wilayah yaitu ketua RW untuk terus menyokong dan memberikan motivasi untuk berdaya.

Perwal nomor 22 tahun 2018 menjelaskan bahwa kampung tematik diharapkan dapat memberi pengaruh positif serta perubahan pola pikir dan perilaku warga serta keberdayaan masyarakat di Kota Semarang. Berkaitan dengan tersebut diketahui bahwa lingkungan sekitar kampung tematik *home industry* telah tergugah untuk mengoptimalkan potensinya dan mengajukan diri sebagai kampung tematik. Berikut hasil wawancara dengan pihak Bappeda, Kecamatan, dan Kelurahan. Bappeda Kota Semarang memberikan keterangan, bahwa :

“Jelas kalau kampung tematik *home industry* memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya untuk memetakan potensi yang dimiliki.

Sekarang di kecamatan candisari kan kampung tematiknya sudah banyak”
(Wawancara dengan Bappeda pada tanggal 02 Februari 2022)

Pihak Kecamatan Candisari menuturkan, bahwa :

“Kampung tematik *home industry* itu membangkitkan semangat masyarakat di wilayah sekitarnya mbak. Contohnya ini kami sedang mendampingi proses pengajuan kampung tematik lele di RW 4”
(Wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Pihak Kelurahan Karanganyar Gunung mengonfirmasi jawaban dari pihak Kecamatan Candisari, bahwa :

“Kalau di karanganyar gunung itu ada kampung tematik *home industry* untuk angkatan pertama. Lalu ada lagi kampung tematik pilah sampah, sama ini baru mau akan atau dalam proses pengajuan yaitu kampung tematik lele”
(Wawancara dengan kelurahan pada tanggal 26 Januari 2022)

Adanya kampung tematik *home industry* memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar RW 5 untuk mengoptimalkan potensinya dan mengajukan diri sebagai kampung tematik misalnya seperti RW 4 yang sedang dalam tahap pengajuan kampung tematik lele.

2. Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perputaran Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Yang Diangkat (Ekonomi)

Hasil dari pelaksanaan kampung tematik berdasarkan perwal no. 22 tahun 2018 selanjutnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat. Hasil tersebut merupakan hasil yang dilihat dari segi ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan diketahui bahwa selama berjalannya kampung tematik *home industry* bertambahnya jumlah pelaku ukm dan meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun sedikit hal ini karena kendala dalam hal pemasaran dan modal. Pihak kecamatan menerangkan, bahwa :

“Sebagian kecil sudah bertambah ya mbak untuk perputaran ekonomi. Baru sedikit untuk menambah pendapatan. Kalau perbaikan untuk menambah pendapatan sekitar itu ada yang tambah, belum keseluruhan. Sehingga harusnya bisa saling sharing ilmu jadi pelaku usahanya bisa berkembang terus, itukan harapannya pemkot Semarang. Tapi kenyataannya, apalagi 2 tahun pandemi. Kemarin mati suri yang jelas. Tidak ada perkembangan untuk ini dan itu. Nah kan mereka juga memiliki kendala di pemasaran. Semua kecamatan kemarin waktu rapat dengan ketahanan pangan untuk pengajuan pendampingan khusus kampung tematik itu kendala yang disampaikan antara lain kucuran dana, pemasaran dan pelatihan. Kalau untuk data ril seperti penurunan pengangguran khusus kampung tematik itu tidak ada. Adanya seperti pertambahan ukm dari tahun ke tahun. Kampung tematik *home industry* itu pertama berdiri ada 9 ukm sekarang sudah berkembang menjadi 19 ukm” (Wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik beserta pelaku ukm menyebutkan hal yang sama bahwa perihal pemasaran masih menjadi masalah. Fasilitas yang diberikan oleh kelurahan atau kecamatan seperti bazar tidak sesuai dengan target pasar pelaku ukm kampung tematik *home industry*. Pelaku ukm tematik *home industry* sebagian besar masih memiliki target pasar menengah ke bawah sementara bazar yang diadakan oleh pihak kecamatan atau kelurahan merupakan bazar dengan target pasar menengah ke bawah. Koordinator kampung tematik memberikan keterangan, bahwa :

“Saya menyayangkan kenapa pihak pemerintah tidak mau membeli produk dari sini. Kan sudah mengetahui kalau di sini sentra *home industry* ada berbagai snack, rajut, kan bisa membantu pemasaran kami dengan membeli produk kami untuk rapat atau acara” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Februari 2022)

Pelaku ukm menuturkan, bahwa :

“Pemasaran mbak masih jadi kendala, misal gini adanya bazar dari kelurahan dan kecamatan itu percuma. Karena bazar yang diadakan itu untuk ukm menengah keatas. Sementara pelaku ukm di kampung tematik *home industry* target pasarnya masih menengah kebawah. Sehingga kesulitan pemasaran” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Hal senada disampaikan oleh pelaku ukm, bahwa :

“Sebelum ada kampung tematik saya sudah sering ikut bazar tapi semenjak ada kampung tematik saya lebih sering ya jadi nambah pengalaman. Cuma ya itu kadang ketika pameran yang cuma pameran aja dalam artian belum terjual.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 16 Februari 2022)

Hasil wawancara kepada para pelaku ukm menyebutkan bahwa terdapat kendala pada modal. Pelaku ukm yang masih belum stabil serta mengalami hambatan dalam pemasaran kesulitan untuk melakukan proses produksi karena kesulitan dalam modal. Berikut hasil wawancara dengan pelaku ukm menuturkan, bahwa :

“Kendala dianggarkan mbak, seperti bantuan modal. Kalau ukm yang sudah lancar ya udah lancar. Kalau yang belum seperti saya ini modal jadi kendala”. (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Februari 2022)

3. Terciptanya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Lebih Baik Dan Tertata (Infrastruktur)

Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata merupakan hasil dari pelaksanaan kampung tematik sesuai dengan perwal No. 22 tahun 2018. Terciptanya kualitas lingkungan ini merupakan hasil yang dilihat dari segi infrastruktur. Segi infrastruktur memperhatikan terwujudnya jalanan lingkungan yang baik, saluran air yang baik, serta sanitasi dan penghijauan yang baik. Adanya pembentukan kampung tematik dan penganggaran kampung tematik memberikan perbaikan pada bidang infrastruktur khususnya yang telah diusulkan melalui proposal pengajuan kampung tematik dan disesuaikan dengan realisasi DPA. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai terciptanya kualitas

lingkungan permukiman di wilayah kampung tematik *home industry* Kota Semarang, bahwa :

“Jelas ada perbaikan lingkungan mbak. Dulu waktu sebelum ada tematik banyak permukiman kumuh di RW 5 misalnya di RT 10. Banyak yang mabuk-mabukan disitu. Setelah adanya pembangunan kampung tematik kawasan lebih tertata” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Pihak kecamatan menuturkan, bahwa :

“Kalau perbaikan lingkungan mungkin belum bisa. Lingkungan yang fisik loh ya. Sudah diperbaiki paving jalannya tapi untuk akses untuk bisa ke kampung tematik *home industry* khususnya untuk destinasi wisata itu masih belum” (Wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Februari 2022)

Peneliti menggali data lebih lanjut bahwa pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* mengalami kendala dalam hal perawatan. Berikut hasil wawancara dengan koordinator dan masyarakat kampung tematik *home industry*. Koordinator memberikan keterangan, bahwa :

“Sanitasi dan penghijauan disini udah bagus. Penghijauan itu sudah merata keseluruhan. Cuma akhir-akhir ini kurang dirawat penghijauannya. Untuk penghijauan di kampung tematik *home industry* disinergikan dengan program lain seperti adanya taman toga, kan itu kita gerakkan lomba itu untuk penghijauan itu. Nah sekarang itu masalahnya di perawatan” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Februari 2022)

Pelaku ukm menuturkan, bahwa :

“Ada jalan, paving, sama grill selokan sekarang sudah neyeng, itu dari tematik dulu. Jadi perawatannya kurang” (Wawancara dengan Ketua RT 10 sekaligus pelaku ukm pada tanggal 20 Februari 2022)

Analisis Pendayaan :

Tahap pendayaan merupakan tahap terakhir sebuah pemberdayaan masyarakat. Pemberian daya kepada target yang berupa diberi daya, kekuasaan, otoritas atau peluang pada pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* dilihat dari fenomena pengembangan kampung tematik *home industry* dan hasil keluaran kampung tematik *home industry* sesuai dengan perwal nomor 22 tahun 2018. Pada pengembangan kampung tematik *home industry* yaitu telah adanya AIESEC sebagai CSR di kampung tematik *home industry* memberikan pelatihan dan pendampingan bagi enam pelaku ukm bidang kuliner. Adanya kuota tersebut karena terbatasnya sumber daya dari AIESEC. Pelaku ukm selain bidang kuliner seperti kriya dan kraf masih belum mendapatkan pendampingan dari tanggung jawab sosial pengusaha. Masyarakat di kampung tematik *home industry* berdaya mengembangkan potensi wilayahnya melalui musrenbang. Masyarakat melalui musrenbang mengusulkan pembangunan galeri sebagai tempat display produk pelaku ukm di kampung tematik *home industry*, namun pembangunan galeri masih belum selesai dan menunggu petunjuk kembali karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19. Pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun dari anggaran kampung tematik *home industry* senilai Rp 200.000.000 kurang optimal karena tidak adanya paguyuban yang memfasilitasi untuk membahas dan merembuk kegiatan yang ada, ketua RW kurang memfasilitasi sehingga berakibat pada usulan di musrenbang kurang optimal.

Masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* turut memiliki kendala dalam hal pemasaran produk, bantuan modal, serta pelatihan dan pendampingan yang masih sesuai dengan yang dibutuhkan.

Penyelesaian kendala ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Bappeda telah menjelaskan bahwa berdasarkan Perwal No. 22 tahun 2018 diketahui bahwa pelaksanaan kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah sehingga kendala atau masalah yang ada di wilayah dapat dipecahkan secara bersama sama dengan bersinergi dengan program lain yang ada di perangkat daerah, melalui CSR, atau swadaya masyarakat. Terkait permasalahan pemasaran masyarakat merasa pihak pemerintahan selalu mendorong untuk terus berproduksi namun tidak menciptakan wahana pemasaran yang tepat. Masyarakat mengklaim bahwa bazar yang ada di kecamatan kelurahan belum bisa mengakomodasi pemasaran masyarakat. Pelaku ukm di kampung tematik *home industry* memiliki target pasar menengah kebawah sementara bazar yang diadakan untuk pelaku ukm menengah keatas. Kendala seperti bantuan modal juga dirasakan oleh pelaku ukm yang masih belum stabil. Koordinator kampung tematik menyebutkan bahwa pada tahun 2017 pernah ada penawaran bantuan modal dari bank BNI atas nama kampung tematik *home industry* dan terdapat dua pelaku ukm yang diberikan bantuan modal yaitu pelaku ukm produksi prol tape dan pelaku ukm sambal abal jabon. Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan lebih lanjut bahwa bantuan modal tersebut diperuntukkan untuk pelaku ukm yang belum memiliki bantuan modal di bank. Koordinator kampung tematik *home industry* menyebutkan bahwa adanya bantuan modal dari BNI tersebut hanya pada tahun 2017 dan setelahnya tidak ada penawaran kembali. Terkait dengan kebutuhan pelatihan dan pendampingan yang masif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan perwal nomor 22 tahun 2018 kegiatan tersebut dapat disinergikan dengan anggaran lain di perangkat daerah. Hasil wawancara

menyebutkan bahwa masyarakat tidak mengetahui prosedur kerja tersebut. Koordinator kampung tematik *home industry* dan masyarakat menyebutkan bahwa selama ini ada kegiatan pelatihan dari kelurahan namun tidak mengerti bahwa fasilitasi kegiatan pelatihan kampung tematik home dapat disinergikan dengan kegiatan pelatihan dari kelurahan tersebut.

Bappeda menjelaskan bahwa adanya sinergi anggaran di perangkat daerah dengan fasilitasi kampung tematik *home industry* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Bappeda menegaskan bahwa apa yang masyarakat butuhkan untuk tidak hanya berhenti sebagai wacana ditingkat masyarakat namun harus terkomunikasikan minimal sampai ke kelurahan. Apa apa yang dibutuhkan masyarakat selama dalam proses komunikasi itu semua bisa dicocokkan kegiatan yang ada untuk mendukung sehingga terjadi proses pemberdayaan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto, 2019) bahwa proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja dalam rangka memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki dengan cara *collective action* dan *networking* sehingga masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Fasilitas yang telah diberikan harus dimanfaatkan untuk membuat masyarakat berdaya, karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya (Mulyawan, 2016:58).

Ketua RW sebagai pemimpin wilayah RW 5 seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mau memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dan berdaya. Tidak tergarapnya sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia dan kelembagaan atau paguyuban kampung tematik *home industry* menyebabkan tidak tumbuhnya inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksanakan pembangunan lanjutan. Mardikanto (2019) mengemukakan bahwa tergarapnya sumber daya lokal (sumber daya alam, manusia, dan kelembagaan) yang ada akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya untuk melaksanakan pembangunan di masa depan. Adanya pengelompokan masyarakat yaitu paguyuban kampung tematik *home industry* yang terstruktur akan membangun kerjasama. (Ir. Hendra Hamid, 2018) mengemukakan bahwa melalui pengorganisasian masyarakat yang terstruktur dan efektif akan memudahkan perbaikan, perubahan, perumusan dan pemecahan masalah, serta menjalin jejaring kemitraan agar memiliki posisi tawar yang kuat.

Pada komponen hasil dan keluaran berdasarkan perwal no 22 tahun 2018 dapat dianalisis dari segi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Pada segi sosial telah memberikan pengaruh positif kepada masyarakat di luar wilayah kampung tematik *home industry* yaitu RW 5, namun segi sosial belum terbentuk pada masyarakat kampung tematik *home industry*. Kendala pada komponen pengkapasitasan seperti kurangnya sifat kepemimpinan Ketua RW 5 untuk memberikan motivasi dan mengarahkan masyarakat untuk terus berdaya melalui kampung tematik *home industry* memberikan dampak pada pencapaian hasil pemberdayaan masyarakat. Koordinator kampung tematik *home industry* serta masyarakat kampung tematik

home industry khususnya para pelaku ukm menyayangkan sikap yang diambil oleh Ketua RW. Hal tersebut berdampak pada eksistensi kampung tematik *home industry* serta produksi para pelaku ukm. Masyarakat menyebutkan bahwa hanya koordinator kampung tematik *home industry* yang bergerak untuk memonitor dan mengembangkan kampung tematik *home industry*. Pada Perwal nomor 22 tahun 2018 menjelaskan bahwa kampung tematik diharapkan dapat memberi pengaruh positif serta perubahan pola pikir dan perilaku warga serta keberdayaan masyarakat di Kota Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa lingkungan sekitar kampung tematik *home industry* yaitu RW 4 telah tergugah untuk mengoptimalkan potensinya dan mengajukan diri sebagai kampung tematik lele.

Segi ekonomi, diketahui diketahui bahwa selama berjalannya kampung tematik *home industry* telah berdampak pada bertambahnya jumlah pelaku ukm dan meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun sedikit hal ini karena kendala dalam hal pemasaran dan modal. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 telah terjadi peningkatan pelaku ukm dari 9 ukm menjadi 19 ukm. Kendala yang dialami oleh pelaku ukm di kampung tematik *home industry* meliputi pemasaran dan modal usaha. Adanya bazar yang memfasilitasi pemasaran produk belum menyelesaikan permasalahan sulitnya pemasaran karena bazar yang diadakan memiliki target pasar yang berbeda dengan target pasar pelaku ukm *home industry*. Produk yang dihasilkan oleh pelaku ukm *home industry* memiliki target pasar menengah ke bawah sementara bazar yang diadakan oleh pihak kecamatan dan kelurahan untuk ukm menengah ke atas. Permasalahan modal dirasakan oleh pelaku ukm yang belum stabil. Adanya kendala pada segi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku ukm sebagai objek dari pemberdayaan masyarakat melalui

kampung tematik *home industry* diketahui bahwa belum tegaknya demokrasi ekonomi. Mardikanto (2019: 41) menyebutkan bahwa walaupun pemberdayaan masyarakat secara bukan sebuah konsep ekonomi, namun pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung memiliki arti menegakkan demokrasi ekonomi. Hal ini karena demokrasi ekonomi berkaitan dengan penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Demokrasi ekonomi yang tegak dapat berjalan apabila masyarakat memberikan aspirasi, dan aspirasi masyarakat yang tertampung dirumuskan dalam kegiatan yang nyata. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menyokong dan menunjang.

Segi infrastruktur, diketahui bahwa terdapat perbaikan kualitas lingkungan fisik seperti paving jalan dan kawasan lebih tertata. Namun, dalam hal akses untuk memasuki kampung tematik *home industry* sebagai objek destinasi wisata masih belum terdapat perbaikan kualitas infrastruktur. Kampung tematik sebagai objek destinasi wisata merupakan salah satu tujuan perwal nomor 22 tahun 2018. Sanitasi dan penghijauan di wilayah kampung tematik *home industry* sudah merata dan keseluruhan di tiap RT hal ini juga hasil sinergi dengan program lain dan kegiatan lomba seperti taman toga, namun masih mengalami kendala dalam hal pemeliharaan dan perawatan. Sanitasi seperti grill selokan yang diberikan dari penurunan anggaran senilai Rp 200.000.000 dari kampung tematik telah mengalami karat dan tidak dapat berfungsi secara optimal.

3.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home industry*

Adapun faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry* antara lain :

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan program untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Hasil wawancara dengan berbagai *stakeholders* di kampung tematik *home industry* diketahui bahwa komunikasi masih kurang sejak pembentukan kampung tematik *home industry*. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yaitu pelaku ukm, bahwa :

“Saya konsultasi dengan pak lurah untuk mengajukan kampung tematik. Setelah proposal jadi saya baru mengkomunikasikan ke RT di lingkungan RW 5” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* pada tanggal 20 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Proposal kampung tematik saya ndak tau mbak. Saya juga ndak punya. Setahu saya proposal itu yang menyusun kelurahan. Masyarakat tidak dilibatkan” (wawancara dengan Koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Ketua RW serta tidak adanya paguyuban menyebabkan usulan dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* tidak terfasilitasi dengan maksimal. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat, bahwa :

“Saya menyayangkan Ketua Rw, Sekretaris, dan sebagainya kok tidak mempedulikan dan merangkul aspirasi masyarakat. Jadi jelas komunikasi kurang.” (Wawancara dengan Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry* sekaligus pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm kampung menyatakan, bahwa :

“Komunikasi kurang. Koordinator yang woro-woro kalau ada info pengurusan perizinan atau pelatihan atau apa gitu melalui whatsapp. Ketua tematik sebagai ketua juga nggak sering *ngoyak ik*.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Komunikasi kurang lancar, kurang menyeluruh, masyarakat kurang mengerti aslinya kampung tematik itu gimana, kurang hokya, kurang bareng-bareng, harusnya lebih guyup lebih rukun. Seharusnya ketua RW membimbing dan menggerakkan. Tapi ini tidak. Kurang aktifnya pengurus setempat dan paguyuban mengakibatkan usulan proposal kebutuhan kampung tematik di musrenbang kurang optimal” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Ketua RW 5 memberikan keterangan, bahwa :

“Saya belum satu tahun nggih jadi ketua rw. Selama saya jadi ketua rw dan dipertemuan rw itu memang dari perwakilan bapak-bapak untuk kampung tematik itu belum ada jadi komunikasi di pertemuan itu saya kira kurang. Yang paham betul tentang tematik yaitu koordinator dan itu belum saya undang untuk pertemuan. Saya mau berkecimpung ke kampung tematik itu aras-arasen, keraguan-raguan, terus saya belum paham bener. Saya ya agak di bilang blegak bleguk iya. Karena komunikasinya saja belum berjalan.” (Wawancara dengan Ketua RW pada tanggal 24 Desember 2021)

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dianalisis bahwa komunikasi masih kurang sejak pembentukan kampung tematik *home industry*. Ketua RW memiliki posisi yang strategis yaitu menyampaikan kebijakan dari pemerintah serta menjadi corong aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik menyebutkan bahwa proposal disosialisasikan dengan ketua RT di lingkungan RW 5 setelah proposal jadi. Masyarakat kurang

mengerti isi dari proposal itu sendiri serta tidak mengetahui pedoman sebagai pegangan mereka untuk berjalan dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Komunikasi yang kurang antara masyarakat dengan Ketua RW menyebabkan usulan melalui musrenbang untuk mendukung potensi serta mengatasi masalah di kampung tematik *home industry* kurang efektif. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila aktor pembuat keputusan mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan tersebut dapat berjalan jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat (Handityasa & Purnaweni, 2020).

3.2.2. Sumberdaya

Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia di kampung tematik *home industry* terdiri dari Bappeda Kota Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Karanganyar Gunung, ketua RW, ketua kampung tematik *home industry*, koordinator kampung tematik *home industry*, dan pelaku ukm. Pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* didampingi oleh pengusaha yang memberikan tanggung jawab sosialnya yaitu AIESEC. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh koordinator kampung tematik *home industry*. Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Aiesec itu ada 6 ukm bidang kuliner yang ikut pendampingan digitalnya”
(Wawancara dengan koordinator pada tanggal 16 Februari 2022)

Ketua RW memberikan keterangan, bahwa :

“Sebenarnya sumber daya manusia banyak mbak. Cuma belum dimanfaatkan. Kalau pendampingan dari aiesec itu cuma bidang kuliner saja, karena menyesuaikan sumberdaya mereka. (Wawancara dengan Ketua RW pada tanggal 24 Desember 2021)

Masyarakat memiliki semangat dan motivasi tinggi terhadap pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik dalam rangka mengangkat potensi wilayah, namun tingginya semangat masyarakat tidak diimbangi dengan kompetensi dan dorongan dari pemangku wilayah RW 5. Pelaku ukm kampung tematik mewakili masyarakat memberikan keterangan, bahwa :

“Waktu lomba ekonomi kreatif kampung tematik (tahun 2018) mendapatkan juara dua saat itu masyarakat sudah bergotong royong sudah semangat. Ketua rw nya cuma jawabnya “*wes seadanya aja. Nggak usah susah susah. Nggak usah ngoyo-ngoyo*”. Malah mendoakan kalah mbak katanya biar nggak menang dan maju lagi. Karena kalau maju lagi butuh biaya lagi katanya. Kita masyarakat sudah semangat, udah kerja bakti, sudah mengeluarkan tenaga. Kok kayak gitu respon Ketua RW nya.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Hal senada disampaikan oleh koordinator kampung tematik *home industry*, menerangkan bahwa :

“Masih jadi penghambat mbak sumber daya disini banyak ada Ketua RW sebagai pembimbing, ada ketua kampung tematik, ada saya sebagai koordinator dan pelaku ukm hanya saja memang untuk guyub sayuk bareng-bareng itu belum bisa. Ya karena paguyubannya belum solid.” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 02 Februari 2022)

Anggaran pada program pemberdayaan kampung tematik yaitu Rp 200.000.000 yang dianggarkan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan pengajuan proposal yang telah diverifikasi. Hasil wawancara Bappeda menyebutkan bahwa anggaran ini memang terbatas dan tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan di wilayah sehingga anggaran pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain di

perangkat daerah, swadaya masyarakat, serta CSR. Bappeda Kota Semarang memberikan keterangan, bahwa :

“Kaitannya dengan kampung tematik ketika dia sudah mendapatkan anggaran 200 juta itu bukan berarti pendanaan dan pelaksanaan disitu distop, kan kita pasti tau kalau anggaran itu terbatas dan tidak bisa meningkatkan semua potensi dan mengatasi semua masalah. Ketika dia sudah mendapatkan anggaran dari APBD 200 juta dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan potensi dan mengatasi masalah itu dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah termasuk di kecamatan dan kelurahan. Kan itu ada PKK, LPMK, musrenbang dan sebagainya” (wawancara dengan Bappeda pada tanggal 14 Juni 2021)

Pihak kecamatan menambahkan, bahwa :

“Anggaran ya hanya pertama kali 200 juta itu. Jika masyarakat ingin melakukan perawatan atau ada event atau apa ya uang swadaya sendiri atau bisa melalui musren”. (wawancara dengan Kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Anggaran ya 200 juta itu mbak. Kalau mau mengusulkan lewat musrenbang, csr atau swadaya. Kalau CSR untuk pembangunan seperti pemeliharaan sarana prasarana, pembangunan fisik, mural itu belum ada. Swadaya atau kas kita juga belum ada.” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Berdasarkan uraian pada sub bab proses diketahui bahwa selama keberjalanan kampung tematik *home industry* terutama dalam pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana serta usulan kebutuhan dan pemecahan masalah belum terakomodasi secara baik karena kurangnya paguyuban yang terstruktur dan solid.

Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Paguyubannya sudah ada. Tapi hanya berhenti dipenunjukan ketua. Itu sudah bertahun-tahun. Seharusnya ketua RW membimbing dan menggerakkan. Tapi ini tidak. Kurang aktifnya pengurus setempat mengakibatkan usulan proposal kebutuhan kampung tematik di musrenbang kurang optimal” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 13 Juni 2021)

Pelaku ukm kampung tematik mewakili masyarakat memberikan keterangan, bahwa :

“Paguyuban kurang bersatu. Kita biasanya jika diadakan pertemuan itu nggak semuanya pada datang. Kan mau dibahas bareng ya gimana ya to?. Kalau ada pelatihan ada yang datang, tapi juga nggak selalu. Kan terhalang mereka pada produksi juga kan mbak.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Pembangunan galeri yang belum tuntas turut serta menghambat pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik *home industry*. Galeri tersebut direncanakan sebagai tempat *display* dan pemasaran produk pelaku ukm kampung tematik *home industry*. Koordinator kampung tematik *home industry* memberikan keterangan, bahwa :

“Kita mengusulkan galeri dari musrenbang. Galeri belum selesai mbak, belum ada plamirnya belum ada terasnya. Cuma bangunan saja. Hal ini karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid. Rencananya galeri sebagai tempat pemasaran produk ukm dan tempat tujuan apabila ada kunjungan” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 24 Desember 2021)

Pelaku ukm mengemukakan pendapat yang sama, bahwa :

“Kalau menurut saya pelaku ukm di RW 5 itu masih apa ya individu, yang sana jualan rajut, satunya jualan bandeng, ya tetep nggak jalan pemberdayaan masyarakatnya yang kayak maju bareng. Ya nunggu galeri jadi mbak nanti bisa *display* produk macam-macam bisa mendatangkan tamu dengan berbagai bazar.” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 24 Desember 2021)

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia di kampung tematik *home industry* sudah cukup baik. Adanya CSR yaitu AIESEC yang memberikan pendampingan serta pelatihan kepada pelaku ukm di bidang kuliner. Masyarakat mempunyai semangat untuk berdaya walaupun kebutuhan tersebut belum diakomodasi dengan baik oleh para pemangku

kepentingan wilayah dan terbatas pada koordinator kampung tematik yang mendorong dan menggerakkan pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*. Partisipasi dari masyarakat untuk pertemuan dalam rangka membahas pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik dapat dikatakan rendah karena hanya beberapa yang turut hadir.

Aspek anggaran, penganggaran kampung tematik senilai Rp 200.000.000 melalui APBD. Pihak Bappeda Kota Semarang mengakui bahwa adanya anggaran tersebut masih terbatas untuk menyelesaikan masalah yang ada serta mengangkat potensi di kampung tematik *home industry*, sehingga anggaran dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah serta adanya CSR. Pihak kecamatan menyebutkan bahwa anggaran Rp 200.000.000 dikucurkan hanya sekali dan untuk perkembangan atau pemeliharaan kampung tematik *home industry* dapat menggunakan swadaya masyarakat. Tidak adanya paguyuban yang berjalan dan solid menyebabkan tidak adanya swadaya masyarakat seperti kas untuk menunjang pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry*.

Aspek sarana dan prasarana pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* masih terbatas. Hal ini terlihat dari pembangunan galeri yang direncanakan sebagai tempat display produk pelaku ukm kampung tematik *home industry* yang masih belum dapat digunakan karena pembangunan belum selesai. Selain itu, belum adanya paguyuban yang solid dan berjalan menyebabkan pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* kurang maksimal. Usulan di musrenbang terkait kebutuhan dan pemecahan masalah belum terakomodasi dengan baik Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa sarana prasarana yaitu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan masih menjadi faktor

penghambat karena belum adanya paguyuban yang solid dan berjalan menyebabkan pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik *home industry* kurang maksimal.

3.2.3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan. Berkaitan dengan disposisi pada pemberdayaan masyarakat di kampung tematik *home industry* diketahui bahwa pemangku kepentingan di wilayah seperti Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry*, Ketua RW yang menjabat saat ini, Ketua kampung tematik *home industry* belum memiliki disposisi yang baik. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yaitu pelaku ukm, bahwa :

“Waktu lomba ekonomi kreatif kampung tematik (tahun 2018) masyarakat sudah bergotong royong sudah semangat. Ketua rw nya yang lama cuma jawabnya “*wes seadanya aja. Nggak usah susah susah. Nggak usah ngoyo-ngoyo*”. Malah mendoakan kalah mbak katanya biar nggak menang dan maju lagi. Karena kalau maju lagi butuh biaya lagi katanya. Kita masyarakat sudah semangat, udah kerja bakti, sudah mengeluarkan tenaga. Kok kayak gitu respon Ketua RW nya” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 20 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* menuturkan, bahwa :

“Disini ada potensi kesenian drumblek dan masih jalan. Kalau galerinya sudah jadi nanti misal dibuat kegiatan pameran di galeri gitu sebulan sekali atau dua bulan sekali. Kami kan perlu berembuk juga. Nah ini ketua RW dan ketua kampung tematiknya kok diem saja. Harusnya kan kita koordinasi dengan RW atau bisa juga dengan sekretaris karena sekretarisnya kebetulan ketua pokdarwis. Nah ini kok sekretarisnya juga kok diem aja. Jadi saya mau jalan kemana mana juga terhambat. Mau jalan sendiri kesalahan” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Hasil wawancara dengan masyarakat menyebutkan bahwa ketua kampung tematik *home industry* lebih fokus dalam forum kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimilikinya secara pribadi bukan pemberdayaan masyarakat melalui kampung

tematik. Berikut hasil wawancara dengan koordinator kampung tematik *home industry*, bahwa :

“Ketua kampung tematik *home industry* memiliki komunitas pelatihan tentang akrilik. Dia link untuk pelatihan juga banyak. Katanya dari dinas ukm, punya banyak relasi, justru harusnya dia linknya banyak nah kenapa tidak berbagi ilmu dengan pelaku ukm di sini. Kemarin kan ketuanya di grup saya berupaya untuk menyambung, “mohon maaf dulu pernah dibentuk kepengurusan baru berhenti di ketua, bagaimana nggih?”. Saya ngechat gitu. Di jawab “besok ya bu” tapi habis itu ya sudah lupa. Saya mau ngoyak-ngoyak juga pakewuh. Padahal saya dikejar dari pihak kelurahan, kecamatan, juga Bappeda. Kalau ada pertemuan atau ada apa tujuannya nyasanya ke saya. Bu ini gimana, ini valid nggak, kepengurusan gerak atau nggak. Kalau kita tidak gerak kepengurusan kita mau maju kemana. Nggak bisa to mbak” (Wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm memberikan keterangan, bahwa :

“Saya menyadari bahwa dari pelaku ukm pun kurang bisa untuk bareng-bareng masih individualis. Kita butuh untuk didorong tapi ya begitu mbak Ketua RW masih belum merangkul. Biasanya disini kalau ada pelatihan atau info bazar koordinator yang memberitau infonya” (Wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 16 Februari 2022)

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dianalisis bahwa disposisi pada pemberdayaan masyarakat di kampung tematik *home industry* diketahui bahwa pemangku kepentingan di wilayah seperti Ketua RW yang menjabat saat pembentukan kampung tematik *home industry*, Ketua RW yang menjabat saat ini, Ketua kampung tematik *home industry* belum memiliki disposisi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Ketua RW baik yang lama atau yang saat ini kurang memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat untuk terus semangat dan berkembang melalui kampung tematik *home industry*. Ketua RW kurang memfasilitasi adanya pertemuan, rembuk bersama, dan penyampaian usulan-usulan. Ketua kampung tematik *home industry* lebih fokus dalam forum

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimilikinya secara pribadi bukan pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi *vested interested* (kepentingan yang tertanam kuat sehingga menghambat perubahan sosial) dalam unit atau bagian tertentu. Sejauh ini dalam pelaksanaannya masyarakat mengemukakan bahwa hanya koordinator kampung tematik *home industry* yang menggerakkan masyarakat untuk terus berdaya melalui kampung tematik *home industry* seperti memberi info terkait pelatihan dari kelurahan, adanya bazar, adanya monitoring, dan lain sebagainya.

3.2.4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi meliputi prosedur dan struktur birokrasi itu sendiri. Prosedur menjadi pedoman wajib implementor dalam melaksanakan kebijakan, sehingga tidak melenceng dari tujuan. Struktur birokrasi yang panjang dapat menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan. Mekanisme yaitu *standart operating procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan tindakan sehingga pelaksanaan program tidak melenceng dari sasaran dan tujuan. Bappeda Kota Semarang menyebutkan, bahwa :

“Perwal no 22 tahun 2018 itu sebagai arah landasan, payung hukum, ada ketentuan seperti tujuan kampung tematik, hasil dan keluaran, bagaimana pembentukan, pendanaan, semua ada disitu, ketika pengajuan kampung tematik sudah kami lampirkan. Sehingga memang sudah disosialisasikan.” (wawancara dengan Bappeda Kota Semarang pada tanggal 13 Desember 2021)

Pihak Bappeda menambahkan, bahwa :

“Kita lakukan sesuai petunjuk yang ada karena memang kampung tematik ini kan berjenjang terbentuknya secara *bottom up*. Payung hukumnya perwal no 22 tahun 2018.” (wawancara dengan Bappeda Kota Semarang pada tanggal 13 Desember 2021)

Pihak Kecamatan Candisari mengatakan, bahwa :

“Pelaksanaan ya sesuai proposal. Kami dari kecamatan kan juga dapat dari kelurahan, dan kelurahan dapat dari masyarakat.” (wawancara dengan kecamatan pada tanggal 21 Januari 2022)

Kelurahan Karanganyar Gunung mengemukakan hal yang sama, bahwa :

“Kita ikuti petunjuk arahan. Pedoman kampung tematik ya hanya proposal” (wawancara dengan kelurahan pada tanggal 26 Januari 2022)

Koordinator kampung tematik *home industry* mengatakan, bahwa :

“Proposal kampung tematik *home industry* saya ndak tau mbak. Saya juga ndak punya. Setahu saya proposal itu yang menyusun kelurahan. Masyarakat tidak dilibatkan. Saya ndak tau mbak kampung tematik itu tujuannya apa secara pasti. Yang saya tau ya perbaikan kualitas lingkungan, terus pengembangan potensi wilayah dengan musrenbang itu kalau sekarang anggarannya. Kalau perwal yang mbak tunjukkan ini saya baru baca pertama kali ini. Tidak ada pembahasan kampung tematik ini mau dibawa kemana. Kurang aktifnya pengurus setempat juga mengakibatkan usulan di musrenbang tidak optimal.” (wawancara dengan koordinator pada tanggal 20 Januari 2022)

Pelaku ukm mengemukakan, bahwa :

“Saya ndak tau mbak pedoman kampung tematik gimana. Pengurus kampung tematik menurut saya tidak berjalan bagus hanya koordinator yang bergerak” (wawancara dengan pelaku ukm pada tanggal 24 Desember 2021)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa Bappeda telah melampirkan perwal no 22 tahun 2018 sebagai petunjuk teknis kepada kecamatan dan kelurahan sebagai bentuk sosialisasi. Kecamatan dan kelurahan melaksanakan pembentukan kampung tematik secara *bottom up* dan penurunan anggaran sesuai proposal yang telah diverifikasi oleh Bappeda. Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal serta tidak mempunyai berkas proposal maupun perwal no 22 tahun 2018 mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik karena tidak mengetahui tujuan pastinya. Koordinator kampung tematik *home industry* menyatakan bahwa kebingungan dalam keberjalanan

kampung tematik *home industry* untuk dibawa kemana karena tidak mempunyai pegangan atau pedoman. Sementara perwal nomor 22 tahun 2018 disebutkan apa saja tujuan dari pelaksanaan kampung tematik, keluaran dari pelaksanaan, hasil dari pelaksanaan, tahapan pembentukan kampung tematik, serta bagaimana pelaksanaan dan pengembangan kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses menggunakan fasilitasi anggaran lain yang ada di Perangkat Daerah. Ketidaktahuan pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat akan berpengaruh terhadap keberjalanan program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Gagasan-gagasan dalam rangka pemecahan masalah serta pengangkatan potensi wilayah tidak terakomodasi dengan baik karena penyampaian secara *bottom up* tidak tercapai secara optimal. Pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat tidak mengerti arah, maksud, dan tujuan dari program tersebut secara rinci. Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang masif terkait arah dan mekanisme program sehingga program dapat berjalan secara optimal.